Terbit *online*: http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/mahardikaadiwidia

Jurnal Mahardika Adiwidia

e-ISSN: 2830-7887

Bingkai Media di Masa Krisis: Studi Kasus Pemberitaan Tempo tentang Pemerintahan Prabowo Pasca Teror 2025

Adi Prakosa

[1]Universitas Nasional, Jakarta
[*)]*E-mail korespondensi: adiprakosaunas@gmail.com*

Diterima: 6-5-2026 | Direvisi: 15-6-2026 | Disetujui: 23-6-2026 | Publikasi online: 29-5-2026

ABSTRACT

This study analyzes the representation of President Prabowo Subianto's administration in Tempo Magazine's coverage before and after the March 19, 2025 terror attack on its editorial office. Using a quantitative content analysis approach, this research examined 112 news articles from 14 editions before and 14 editions after the incident. Representation was measured through three dimensions: news framing, news tone, and news sources. Findings reveal no significant differences in framing and news tone between the two periods. Morality frames dominated both periods, while neutral tone remained consistently predominant. However, a significant difference emerged in source selection, with official sources increasing dramatically from 11.67% to 42.31% after the terror incident. This shift indicates that while Tempo maintained its critical editorial stance and framing consistency, the crisis situation compelled adaptation in source selection as a form of discursive negotiation with power structures. These findings reinforce Stuart Hall's representation theory and Michel Foucault's power/knowledge concept, demonstrating that media actively constructs meaning under ideological influences and power relations rather than merely reflecting reality. The study recommends strengthening media's watchdog function and diversifying news sources to maintain journalistic independence during crises.

Keywords: *media representation, framing, news tone, news sources, President Prabowo, Tempo Magazine, terror attack*

PENDAHULUAN

Situasi kebebasan pers di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang kompleks dan dinamis, ditandai dengan kemajuan signifikan pasca-era reformasi namun juga dihadapkan pada tantangan struktural dan politis yang terus berkembang. Secara hukum, kerangka kebebasan pers di Indonesia termasuk salah satu yang paling liberal di Asia Tenggara, dengan UU No. 40/1999 tentang Pers yang secara tegas melarang sensor dan memberikan perlindungan bagi aktivitas jurnalistik (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers). Amandemen UUD 1945 juga menjamin kebebasan berekspresi, namun implementasi di lapangan kerap berbenturan dengan sejumlah regulasi yang multitafsir, seperti UU ITE yang sering digunakan untuk membungkam kritik dan melaporkan jurnalis atas tuduhan pencemaran nama baik (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan atas UU ITE). Kondisi ini menciptakan efek "pendinginan" (chilling effect), di mana media dan wartawan cenderung melakukan sensor diri (self-censorship) untuk menghindari risiko hukum, terutama ketika meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, lingkungan, dan pelanggaran HAM berat di masa lalu (Tapsell, 2017). Selain itu, dinamika politik lokal dan kekuatan ekonomi juga turut memengaruhi independensi pers. Winters (2013) mengungkapkan bahwa kepemilikan media oleh konglomerasi atau kelompok bisnis tertentu sering kali mengarah pada keberpihakan editorial yang mengaburkan fungsi kontrol sosial pers, karena media menjadi instrumen untuk melindungi kepentingan bisnis dan politik pemiliknya.

Di sisi lain, kebebasan pers di Indonesia juga diuji oleh tantangan digital dan ancaman kekerasan fisik terhadap jurnalis. Era disrupsi digital telah melahirkan banjir informasi dan hoaks, yang mendorong pemerintah dan masyarakat untuk menuntut akuntabilitas media, namun di sisi lain juga membuka ruang bagi intervensi eksternal melalui serangan siber atau peretasan terhadap akun-akun media (Tapsell, 2017). Dari perspektif keselamatan fisik, meskipun kekerasan terhadap wartawan tidak selalu berujung fatal, laporan dari organisasi seperti Aliansi Jurnalis Independen menunjukkan bahwa insiden kekerasan—baik dari aparat negara saat aksi demonstrasi maupun dari kelompok masyarakat sipil—masih sering terjadi, terutama di daerah-daerah dengan konflik agraria atau politik identitas yang tinggi (Aliansi Jurnalis Independen, 2023).

Komite Keselamatan Jurnalis (2024) juga mencatat bahwa ancaman kekerasan fisik dan intimidasi terhadap jurnalis masih menjadi masalah struktural yang belum terselesaikan, dengan sejumlah kasus tidak ditangani secara tuntas oleh aparat penegak hukum. Secara keseluruhan, kebebasan pers di Indonesia telah berhasil meninggalkan bayang-bayang Orde Baru, tetapi ia belum sepenuhnya matang. Ia merupakan arena pertarungan antara semangat reformasi dan praktik kekuasaan lama, yang membutuhkan pengawasan berkelanjutan dari masyarakat sipil dan penguatan etika profesi jurnalisme agar tetap menjadi pilar demokrasi yang kokoh di tengah gelombang otoritarianisme global (Tapsell, 2017; Winters, 2013).

Pers memiliki pengaruh signifikan dalam mengarahkan cara pandang khalayak terhadap peristiwa yang diberitakan, yang kemudian berpotensi menjadi opini publik. McCombs dan Shaw (1972) menjelaskan bahwa pers tidak hanya menyampaikan pemberitaan kepada publik tentang apa yang perlu diketahui, tetapi juga mengarahkan pada apa yang dianggap penting oleh publik. Dengan pemahaman ini, pers secara sistematis menentukan perhatian publik terhadap isu-isu tertentu, memengaruhi persepsi publik, dan berpotensi membentuk opini publik.

Dalam negara demokrasi, pers diharapkan menjalankan peran sebagai pengontrol (watchdog) terhadap kekuasaan. McQuail (2010) menjelaskan bahwa pers diharapkan melaksanakan perannya secara objektif dalam memberitakan realitas yang memiliki nilai tinggi bagi publik. Namun, Herman dan Chomsky (1988) dalam Manufacturing Consent memperlihatkan bagaimana pers, khususnya yang dikuasai oleh perusahaan dan kepentingan elit politik, dapat menjadi pers yang memberitakan secara subyektif untuk memperkuat dan mempertahankan kekuasaan.

Kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia menjadi isu serius yang mengancam kebebasan pers. Sepanjang tahun 2025, tercatat 75 kasus kekerasan terhadap jurnalis hingga Oktober, dengan aktor pelaku terbanyak adalah anggota kepolisian . Kasus teror terhadap Majalah Tempo pada 19 Maret 2025 menjadi salah satu episode paling menonjol dalam catatan kekerasan terhadap pers tahun tersebut. Pada hari Rabu, 19 Maret 2025, redaksi Tempo menjadi sasaran teror berupa paket berisi kepala babi yang secara khusus ditujukan kepada wartawati Francisca Christy Rosana. Tiga hari kemudian, paket teror kedua berisi bangkai tikus tanpa kepala tiba di kantor redaksi .

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menganalisis bahwa teror tersebut merupakan pola serangan sistematis yang bertujuan meneror, mengancam, dan mengintimidasi jurnalis Tempo serta keluarganya . Teror ini diduga memiliki korelasi dengan produk jurnalistik tertentu yang dibahas oleh Tempo melalui program podcast "Bocor Alus Politik" dan dilakukan untuk memberangus kebebasan pers .

Peristiwa teror ini menjadi titik balik penting dalam hubungan antara pers dan kekuasaan di Indonesia. Sikap pemerintah terhadap peristiwa ini menuai kontroversi. Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, menyatakan bahwa kejadian tersebut bukan ancaman serius dan menyebut "dimasak saja"—pernyataan yang memicu reaksi negatif luas. Presiden Prabowo akhirnya menanggapi peristiwa ini sebagai upaya "mengadu domba" antara pemerintah dan media.

Penelitian ini memilih Majalah Tempo karena majalah ini memiliki reputasi kuat sebagai media independen, kritis, dan konsisten dalam pemberitaan masalah politik nasional. Hill (2011) menjelaskan bahwa Majalah Tempo telah dikenal sejak masa Orde Baru hingga Reformasi sebagai penerus jurnalisme kritis dan independen. Tempo tetap mempertahankan posisinya sebagai pers yang memberitakan isu kekuasaan dengan pendekatan jurnalisme investigatif di tengah arus media yang kian terpisah antara yang partisan dan pragmatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif pola representasi pemerintahan Presiden Prabowo dalam pemberitaan Majalah Tempo sebelum dan sesudah peristiwa teror, mengevaluasi perbedaan signifikan dalam aspek pembingkaian, nada, dan penggunaan sumber berita, serta mengembangkan rekomendasi model representasi pemberitaan yang lebih efektif dan berimbang.

Berdasarkan uraian terdahulu, penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1) Apakah terdapat perbedaan pembingkaian berita Majalah Tempo sebelum dan sesudah peristiwa teror 19 Maret 2025?; 2 Apakah terdapat perbedaan nada berita Majalah Tempo sebelum dan sesudah peristiwa teror 19 Maret 2025?;3 Apakah terdapat perbedaan sumber berita Majalah Tempo sebelum dan sesudah peristiwa teror 19 Maret 2025?

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam kajian media, teori representasi merupakan kerangka teoritis yang membahas bagaimana media membentuk, menyusun, dan merepresentasikan realitas sosial, budaya, politik, dan identitas kelompok tertentu. Stuart Hall (1997) adalah tokoh penting dalam teori representasi, yang menyatakan bahwa representasi termasuk dalam proses pembentukan

makna budaya. Hall mengemukakan tiga pendekatan penting: pendekatan reflektif (media menyampaikan realitas), pendekatan intensional (maksud pembuat menentukan makna), dan pendekatan konstruktivis (praktik sosial dan kultural membentuk makna).

Littlejohn dan Foss (2009) menjelaskan bahwa representasi adalah proses simbolik di mana makna tidak bersifat tetap atau berlaku umum, melainkan dibentuk oleh norma dan struktur sosial yang mendasari cara kita berkomunikasi. Barker (2008) menekankan bahwa representasi berkaitan erat dengan wacana dan kekuasaan—siapa yang memiliki kekuasaan untuk merepresentasikan dapat membentuk cara pandang masyarakat.

Dalam perspektif Foucault (1972), wacana adalah sistem representasi yang membentuk objek pembicaraan dalam masyarakat. Foucault menegaskan bahwa kekuasaan tidak selalu bersifat koersif tetapi juga produktif—media menciptakan realitas sosial melalui pembentukan pengetahuan dan wacana . Pemikiran ini menjadi inspirasi bagi Hall, yang memandang media sebagai arena produksi makna dan sekaligus alat hegemoni yang dapat menegaskan atau menantang struktur kekuasaan.

Merujuk Gabore (2020), representasi dalam pemberitaan media dapat diukur melalui tiga aspek utama: framing (cara media memilih, menekankan, dan mengorganisasi informasi), nada berita atau tone (sikap atau kecenderungan media, positif, negatif, atau netral), dan sumber berita (siapa yang dijadikan narasumber yang memengaruhi sudut pandang dan legitimasi pemberitaan).

Teori framing merupakan salah satu teori penting dalam studi komunikasi massa yang merujuk pada gagasan bahwa media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga mengonstruksi realitas melalui pemilihan sudut pandang, kata, narasi, dan penekanan pada elemen tertentu dari suatu peristiwa. Menurut Entman (1993), framing adalah proses memilih dan menekankan elemen tertentu dari realitas untuk membangun interpretasi makna tertentu. Framing mencakup empat fungsi utama: mendefinisikan masalah, mendiagnosis penyebab masalah, membuat penilaian moral, dan menyarankan solusi.

Semetko dan Valkenburg (2000) mengembangkan pendekatan deduktif berbasis analisis isi kuantitatif untuk mengidentifikasi lima bingkai berita umum (generic frames) yang sering digunakan media dalam pemberitaan politik: conflict frame (penekanan pada pertentangan), human interest frame (penekanan pada sisi emosional), economic consequences frame (penekanan pada dampak ekonomi), morality frame (pengaitan isu dengan nilai moral), dan responsibility attribution frame (penunjukan pihak yang bertanggung jawab).

Penelitian Alqausar (2026) menunjukkan bahwa Tempo secara konsisten mengonstruksi bencana bukan sebagai peristiwa alam murni, tetapi sebagai krisis yang didorong oleh tata kelola yang buruk, pengabaian peringatan dini, dan degradasi lingkungan . Hal ini memperkuat pemahaman tentang konsistensi Tempo dalam menjalankan peran watchdog melalui framing kritis terhadap kekuasaan.

Nada berita (news tone) didefinisikan sebagai penilaian emosional atau sikap yang ditunjukkan oleh isi berita terhadap kandidat tertentu, yang dapat bersifat positif, negatif, atau netral (Dunaway, 2013). Sheafer (2007) menekankan pentingnya nada evaluatif dalam

pemberitaan media, yaitu sikap positif, negatif, atau netral yang melekat pada pemberitaan suatu isu.

Alain de Botton (2014) menjelaskan bahwa nada berita bukan hanya gaya bahasa tetapi juga faktor penting dalam menyampaikan makna dan mempengaruhi persepsi publik. De Botton berpendapat bahwa media masa kini cenderung menyampaikan berita dengan cara yang kering, impersonal, dan tampaknya objektif, meskipun faktanya sarat dengan pilihan nilai yang menyembunyikan emosi penting.

Starkman (2014) menekankan bahwa nada berita sangat memengaruhi bagaimana jurnalisme beroperasi, terutama dalam hal pengawasan kekuasaan. Ia membedakan dua model: accountability journalism yang menggunakan nada kritis, tajam, dan skeptis, serta access journalism yang cenderung menggunakan nada lembut dan bersahabat dengan narasumber.

Shoemaker dan Reese (2014) berpendapat bahwa media tidak pernah bekerja secara netral dalam memberitakan realitas sosial, termasuk memilih dan mengorganisasi sumber berita. Dalam teori Hierarchy of Influences, mereka menganggap pemilihan sumber berita sebagai komponen pengaruh pada level rutinitas media. Media cenderung memilih sumber yang mudah diakses, berwibawa, dan relevan dengan nilai berita.

McQuail (2010) menggarisbawahi bahwa media tidak selalu netral dalam memilih sumber. Karena dianggap kredibel, dapat dipercaya, dan mudah diakses, media cenderung mengutamakan sumber-sumber institusional dan resmi seperti pejabat pemerintah, tokoh politik, lembaga penegak hukum, dan perwakilan perusahaan. Gabore (2020) mendefinisikan sumber berita sebagai individu, institusi, atau kelompok yang dikutip atau dirujuk sebagai narasumber atau otoritas informasi dalam teks berita, yang dapat dibedakan menjadi sumber resmi dan tidak resmi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik yang menekankan pengukuran objektif terhadap realitas sosial berdasarkan data yang dapat diamati dan dihitung (Neuman, 2014). Pendekatan penelitian adalah kuantitatif dengan metode analisis isi, sebagaimana dikembangkan oleh Krippendorff (2018) dan Neuendorf (2017), yang menekankan proses pengodean sistematis, objektif, dan replikasi untuk mengukur dan membandingkan perbedaan representasi media dalam teks.

Unit analisis adalah artikel pemberitaan dalam edisi cetak Majalah Tempo yang membahas pemerintahan Presiden Prabowo dan kebijakannya yang dijadikan laporan utama. Kriteria pemilihan: (1) artikel secara eksplisit membahas Presiden Prabowo dan kebijakan pemerintahan; (2) merupakan produk jurnalistik seperti laporan utama atau artikel berita; (3) setiap artikel berfungsi sebagai unit analisis.

Periode penelitian: 14 edisi sebelum peristiwa teror (16-22 Desember 2024 sampai 17-23 Maret 2025) dan 14 edisi sesudah peristiwa teror (24-30 Maret 2025 sampai 23-29 Juni 2025). Total terkumpul 60 artikel sebelum dan 52 artikel sesudah peristiwa teror. Variabel

penelitian dioperasionalisasikan sebagai berikut: Framing (Bingkai Pemberitaan): Mengacu pada Semetko dan Valkenburg (2000), dikategorikan menjadi: Conflict frame (kode 1): menekankan pertentangan antar individu/kelompok; Human interest frame (kode 2): menekankan aspek emosional/kemanusiaan; Economic consequences frame (kode 3): menekankan dampak ekonomi; Morality frame (kode 4): mengaitkan isu dengan nilai moral. Responsibility attribution frame (kode 5): menunjukkan pihak yang bertanggung jawab. Nada Berita: Mengacu pada Gabore (2020) dan Dunaway (2013), dikategorikan menjadi: Positif (kode 1): menunjukkan dukungan/apresiasi; Netral (kode 2): deskriptif tanpa penilaian emosional; Negatif (kode 3): menunjukkan kritik/kecaman. Sumber Berita: Mengacu pada Gabore (2020), dikategorikan menjadi: Sumber resmi (kode 1): pernyataan dari otoritas formal (pemerintah, institusi publik, pejabat negara); Sumber tidak resmi (kode 2): pernyataan dari individu/kelompok tanpa otoritas formal.

Pengujian reliabilitas antar koder menggunakan Cohen's Kappa melibatkan dua koder. Hasil uji menunjukkan reliabilitas sangat tinggi: bingkai konflik (1.00), human interest (1.00), konsekuensi ekonomi (1.00), moralitas (0.96), tanggung jawab (0.94); nada berita positif, netral, dan negatif (1.00); sumber resmi dan tidak resmi (1.00). Nilai Kappa 0.81-1.00 menunjukkan kesepakatan hampir sempurna. Analisis data menggunakan uji Chi-Square (χ^2) untuk menguji perbedaan signifikan distribusi frekuensi variabel antara dua periode penelitian. Signifikansi ditetapkan pada $\alpha = 0.05$.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Distribusi frekuensi bingkai pemberitaan sebelum peristiwa teror: bingkai konflik 14 (23,33%); human interest 1 (1,67%); konsekuensi ekonomi 11 (18,33%); moralitas 26 (43,33%); tanggung jawab 8 (13,33%). Setelah peristiwa teror: konflik 10 (19,23%); human interest 4 (7,69%); konsekuensi ekonomi 13 (25,00%); moralitas 16 (30,77%); tanggung jawab 9 (17,31%). Hasil uji Chi-Square menunjukkan $\chi^2 = 4.525$, df = 4, $p = 0.3396$. Karena $p > 0.05$, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam bingkai pemberitaan antara kedua periode.

Nada Berita. Distribusi frekuensi nada berita sebelum peristiwa: positif 3 (5,00%); netral 34 (56,67%); negatif 23 (38,33%). Setelah peristiwa: positif 2 (3,85%); netral 29 (55,77%); negatif 21 (40,38%). Hasil uji Chi-Square menunjukkan $\chi^2 = 0.117$, df = 2, $p = 0.943$. Karena $p > 0.05$, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam nada pemberitaan antara kedua periode.

Sumber Berita. Distribusi frekuensi sumber berita sebelum peristiwa: sumber resmi 7 (11,67%); sumber tidak resmi 53 (88,33%). Setelah peristiwa: sumber resmi 22 (42,31%); sumber tidak resmi 30 (57,69%). Hasil uji Chi-Square menunjukkan $\chi^2 = 12.08$, df = 1, $p = 0.00051$. Karena $p < 0.05$, terdapat perbedaan signifikan dalam penggunaan sumber berita antara kedua periode.

Pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majalah Tempo mempertahankan konsistensi dalam bingkai dan nada pemberitaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo meskipun terjadi peristiwa teror. Dominasi bingkai moralitas (43,33% sebelum, 30,77% sesudah) mengindikasikan kecenderungan Tempo membingkai

kepemimpinan Prabowo dalam kerangka penilaian etis, menekankan persoalan moral, tanggung jawab, dan legitimasi kekuasaan.

Dalam perspektif Stuart Hall (1997), dominasi bingkai moralitas mencerminkan bagaimana media tidak sekadar merefleksikan kenyataan tetapi aktif dalam produksi makna, memilih aspek tertentu dari kenyataan untuk ditonjolkan sehingga membentuk representasi yang mempengaruhi cara masyarakat memaknai kepemimpinan Prabowo. Penelitian Luqman (2025) tentang sampul Tempo edisi "Habis Gelap Terbitlah Gelap" menunjukkan bahwa visual cover membawa pesan kritik terhadap kinerja pemerintahan 100 hari yang cenderung negatif, dengan penggunaan simbol-simbol yang membangkitkan respons emosional pembaca .

Penurunan bingkai moralitas setelah teror dapat dipahami dalam kerangka Foucault (1980) tentang power/knowledge. Situasi krisis menjadi momen di mana kekuasaan negara menguatkan kendali atas narasi publik. Media cenderung mengurangi intensitas kritik moralitas sebagai bentuk penyesuaian terhadap tekanan situasional atau pengaruh wacana keamanan nasional yang dominan. Ini sejalan dengan temuan penelitian tentang pernyataan pejabat yang timpang dan tidak empatik yang menciptakan disonansi dan mempercepat degradasi legitimasi pemerintah.

Dominasi nada netral (56,67% sebelum, 55,77% sesudah) tidak serta-merta dapat diartikan sebagai sikap objektif atau bebas nilai. De Botton (2014) berpendapat bahwa netralitas dalam berita kerap menjadi strategi media untuk menjaga citra profesionalisme sambil tetap menyelipkan pilihan ideologis secara halus. Nada netral menjadi "topeng profesionalisme" yang digunakan media untuk mendapatkan kepercayaan publik sekaligus menjaga pengaruhnya di tengah pasar berita yang penuh persaingan.

Peningkatan nada negatif dari 38,33% menjadi 40,38% sejalan dengan apa yang disebut de Botton sebagai kecenderungan media untuk "memanipulasi kekhawatiran" publik. Berita bernada negatif sering kali lebih menarik perhatian karena membangkitkan emosi waspada, cemas, dan marah. Dalam konteks Tempo, sedikit peningkatan nada negatif dapat dimaknai sebagai respons redaksional yang mengimbangi kebutuhan sikap kritis terhadap pemerintah dalam situasi krisis.

Temuan paling signifikan dalam penelitian ini adalah perubahan drastis dalam pemilihan sumber berita: sumber resmi melonjak dari 11,67% menjadi 42,31% setelah peristiwa teror. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana Tempo menyesuaikan pemilihan sumber berita terhadap dinamika situasi krisis.

Dalam perspektif Foucaultian yang diadopsi Hall, media massa bukan sekadar penyampai informasi melainkan agen yang berpartisipasi dalam pembentukan regime of truth—sistem kebenaran yang diterima masyarakat. Pemilihan sumber berita oleh Tempo dapat dilihat sebagai bagian dari praktik diskursif yang sarat dengan pertarungan makna dan legitimasi. Sebelum teror, Tempo cenderung memilih sumber dari kalangan pengamat politik, aktivis masyarakat sipil, dan akademisi kritis—pilihan yang mencerminkan posisi watchdog yang aktif mengonstruksi representasi kritis terhadap pemerintah. Pasca-teror, pemberitaan lebih sering mengutip pejabat pemerintah, pernyataan resmi Presiden, dan institusi keamanan negara.

Penggunaan sumber resmi pasca-teror berfungsi memperkuat narasi dominan yang berusaha memantapkan legitimasi pemerintah di mata publik (Foucault, 1980). Dalam pandangan Hall (1980), ini adalah bagian dari proses encoding, di mana media mengonstruksi pesan yang selaras dengan kebutuhan kekuasaan hegemonik, terutama dalam situasi darurat yang menuntut stabilitas.

Starkman (2014) memberikan dimensi tambahan dengan kritik terhadap semakin melemahnya fungsi watchdog media. Perubahan signifikan dalam pemilihan sumber berita ini dapat dibaca sebagai bagian dari fenomena yang disebut Starkman sebagai "the watchdog that didn't bark"—potensi kompromi media antara menjaga akses terhadap sumber kekuasaan dan menjalankan fungsi pengawasan publik.

Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori representasi dan framing dalam konteks komunikasi politik Indonesia. Temuan bahwa bingkai dan nada berita relatif konsisten sementara pemilihan sumber berita berubah signifikan memperkaya pemahaman tentang mekanisme adaptasi media dalam situasi krisis. Hal ini menunjukkan bahwa framing bukan hanya persoalan konstruksi makna tetapi juga strategi negosiasi kekuasaan yang diwujudkan melalui otoritas sumber informasi.

Integrasi teori representasi Hall dan konsep power/knowledge Foucault memberikan dasar untuk pengembangan model analisis yang lebih kritis. Penelitian ini menyoroti bahwa kekuasaan tidak hanya memengaruhi isi berita secara langsung tetapi juga melalui pemilihan sumber berita sebagai bentuk legitimasi diskursif. Penelitian tentang komunikasi politik di era digital menunjukkan bahwa narasi identitas nasional diartikulasikan melalui simbol-simbol yang mencerminkan fokus dan peran masing-masing aktor politik

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap tiga aspek utama representasi (bingkai pemberitaan, nada berita, dan sumber berita), dapat disimpulkan:

1. Bingkai Pemberitaan: Tidak terdapat perbedaan signifikan antara bingkai yang digunakan sebelum dan sesudah peristiwa teror (χ^2=4.525, p=0.3396). Meskipun secara deskriptif terdapat perubahan proporsi, perubahan ini tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan Tempo mempertahankan kecenderungan framing yang menjadi ciri khasnya sebagai media watchdog.
2. Nada Berita: Tidak terdapat perbedaan signifikan dalam nada pemberitaan sebelum dan sesudah peristiwa teror (χ^2=0.117, p=0.943). Dominasi nada netral tetap menjadi pola utama, dengan fluktuasi minor yang secara statistik tidak signifikan. Ini menandakan Tempo cenderung mempertahankan konsistensi gaya editorialnya.
3. Sumber Berita: Terdapat perbedaan signifikan dalam pemilihan sumber berita (χ^2=12.08, p=0.00051). Setelah peristiwa teror, terjadi peningkatan penggunaan sumber resmi dari 11,67% menjadi 42,31%. Hal ini menunjukkan Tempo melakukan penyesuaian nyata dalam pemilihan sumber informasi sebagai respons terhadap situasi krisis.

Saran: Penelitian lanjutan disarankan menambahkan berbagai media, mengombinasikan pendekatan kuantitatif dengan analisis wacana kritis, melakukan penelitian longitudinal dengan rentang waktu lebih panjang, dan menambahkan variabel interaktif dengan audiens di media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Aliansi Jurnalis Independen (AJI). (2023). Catatan Akhir Tahun: Kondisi Kebebasan Pers dan Keselamatan Jurnalis 2023. Jakarta: AJI Indonesia.

Alqausar, A. (2026). Media Framing of Disaster Governance in Indonesia: A Pan and Kosicki Analysis of Tempo's "High Prestige of Emergency Disaster". Rainbow: Journal of Literature, Linguistics and Cultural Studies, 15(1).

Barker, C. (2008). Cultural Studies: Theory and Practice (3rd ed.). Sage Publications.

Bertemu Komisi Reformasi Polri, PWI Dorong Perlindungan terhadap Jurnalis dan Kepastian Hukum. (2025, November 26). iNews.id.

de Botton, A. (2014). The News: A User's Manual. Vintage Books.

Dunaway, J. (2013). Media Ownership and Story Tone in Campaign News. American Politics Research, 41(1), 24-48.

Entman, R. M. (1993). Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm. Journal of Communication, 43(4), 51-58.

Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. Routledge.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. Pantheon.

Gabore, S. M. (2020). Western and Chinese Media Representation of Africa in COVID-19 News Coverage. Asian Journal of Communication, 30(5), 1-18.

Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Sage & Open University Press.

Herman, E. S., & Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon.

Hill, D. T. (2011). Journalism and Politics in Indonesia: A Critical Biography of Mochtar Lubis. Routledge.

Kaleidoskop 2025: 5 Aksi Kekerasan Terhadap Jurnalis di Indonesia. (2025, December 15). Tribunnews.com.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI. (2025, March 27). Keterangan Pers Nomor 16/HM.00/03/2025 tentang Pelanggaran HAM dalam Kasus Teror Kepala Babi dan Bangkai Tikus kepada Tempo.

Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ). (2024). Laporan Tahunan Kekerasan Terhadap Jurnalis di Indonesia. Jakarta: KKJ.

Krippendorff, K. (2018). Content Analysis: An Introduction to Its Methodology (4th ed.). Sage Publications.

Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2009). Theories of Human Communication (9th ed.). Wadsworth.

Luqman, R. F. (2025). Framing Analysis on the Visual Cover of Political Magazines in Indonesia. INJUCOSPOS, 6(1).

Maryufani, F., Ramdani, A. H., Affandi, A. F. M., & Rohimakumullah, M. A. (2025). Pemilihan Presiden 2024: Konstruksi Identitas Nasional Melalui Media Sosial Instagram Calon Presiden. Indonesian Journal of Digital Public Relations, 4(1), 88-99.

McCombs, M., & Shaw, D. (1972). The Agenda-Setting Function of Mass Media. Public Opinion Quarterly, 36(2), 176-187.

McQuail, D. (2010). Mass Communication Theory (6th ed.). Sage Publications.

Neuendorf, K. A. (2017). The Content Analysis Guidebook (2nd ed.). Sage Publications.

Neuman, W. L. (2014). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches (7th ed.). Pearson.

Retorika Kuasa Menuju Budaya Resistensi Digital: Krisis Komunikasi Pejabat Indonesia pada Media Massa. (2025). Garuda Kemdiktisaintek.

Ridwan Mohamad, N., Sahab, A., Aribowo, A., Wibisono, R. B., & Asfara, M. (2025). Assessing Political Communication Reform in Digital Age: Case of 2024 Indonesia Presidential Elections. Journal of Law and Legal Reform, 6(3), 1631-1684.

Semetko, H. A., & Valkenburg, P. M. (2000). Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News. Journal of Communication, 50(2), 93-109.

Sheafer, T. (2007). How to Evaluate It: The Role of Story-Evaluative Tone in Agenda Setting and Priming. Journal of Communication, 57(1), 21-39.

Shoemaker, P. J., & Reese, S. D. (2014). Mediating the Message in the 21st Century: A Media Sociology Perspective (3rd ed.). Routledge.

Starkman, D. (2014). The Watchdog That Didn't Bark: The Financial Crisis and the Disappearance of Investigative Journalism. Columbia University Press.

Tapsell, R. (2017). Media and Power in Indonesia: Oligarchy, Democracy, and the Digital Age. ISEAS Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. (2016). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (1999). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Sekretariat Negara.

Winters, J. A. (2013). Oligarchy and Democracy in Indonesia. Indonesia, (96), 11-33. Cornell University Press